

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewa, Muh. Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Kendari: Unhalu Press.
- Data, Pusat dan Analisa Tempo. 2020. *Menelaah Manfaat Kebijakan Impor Garam Pemerintah Presiden Joko Widodo*, Jakarta: Tempo Publishing.
- Fahmal, A. Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Ilmar, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas.
- Labolo, Muhadam. 2011, *Memahami ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Moenta, A.P. dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Slamet. 2019. *Kekuasaan Pemerintahan*, Tangerang: Loka Aksara.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika

Sulastrri, Siti. 2021. *Memahami Lembaga-Lembaga Negara dalam Pemerintahan Daerah*, Semarang: Mutiara Aksara.

Wahyu, Anis Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Muninggar, S. D. D., Mahira, D. F., & Rahayu, L. S. "Konseptualisasi Omnibus Law Sebagai Upaya Sinkronisasi Regulasi Pergaraman di Indonesia". *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Nur Aedah. "Peran dan Fungsi Kepimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura". *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5 Nomor 3, 2017

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Administrative law & Governance Journal*, Vol. 2 Nomor 3, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

INTERNET

Adhyasta Dirgantara, *Kasus Korupsi Impor Garam, Modus Tersangka Cari Keuntungan Pribadi*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/04/10511831/kasus-korupsi-impor-garam-modus-tersangka-cari-keuntungan-pribadi>, (Diakses tanggal 05 November 2022)

Biro Hubungan Masyarakat. Siaran Pers Sinergitas Kemendag dan KKP, <https://www.kemendag.go.id/id/search/sinergitas-kemendag-dan-kkp-tingkatkan-efektivitas-pengawasan-impor-komoditas-hasil-perikanan-dan-komoditas-pergaraman-serta-penegakan-hukum-bidang-perdagangan-1>, (Diakses tanggal 25 September 2022)

Kemendag, *Tugas dan Fungsi*, <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri>, (Diakses tanggal 19 Mei 2022)

Lina Herlina, *Produksi Garam Sulawesi Selatan Turun, Ini Penyebabnya*, <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/453393/produksi-garam-sulawesi-selatan-turun-ini-penyebabnya>, (Diakses tanggal 23 Maret 2022).

Muhammad Idris, *Pemerintah Jokowi Mau Impor 3 Juta Ton Garam Tahun ini*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/09/25/060223926/pemerintah-jokowi-mau-impor-3-juta-ton-garam-tahun-ini>, (Diakses tanggal 23 Januari 2022).

Oki Pratama. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut). <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. (Diakses tanggal 11 November 2021).

Republika, *Penjelasan Menperin Mengapa Kebutuhan Impor Garam Tinggi*, <https://google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzyoua377>, (Diakses tanggal 23 Januari 2022).






SKRIPSI

Ade Putra Kurniawan, 2018, "Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Ikan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri Dilihat Dari UU Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta.

Mukti Maulana Tamami, 2020, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Kebijakan Impor Garam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Dan Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

LAMPIRAN

Lampiran Surat Penelitian Kab. Jeneponto

 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Ishak Iskandar No 30 Bontosunggu Telp (0419) 2410044 Kode Pos 92311	
IZIN PENELITIAN Nomor: 73.4/395/IP/DPMPTSP/IP/II/2022	
DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 390/II/REK-IP/DPMPTSP/2022. Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :	
Nama	: DYNO THIODORES
Nomor Pokok	: B021181322
Program Studi	: HUKUM ADM. NEGARA
Lembaga	: UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA (S1)
Alamat Peneliti	: JL.CENDRAWASI KEL. PANAMBUNGAN KEC. MARISO
Lokasi Penelitian	: KAB. JENEPONTO
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka MENELITI dengan Judul :	
TINJAUAN HUKUM ATAS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGENDALIAN IMPOR PERGARAMAN BERDASARKAN PP NOMOR 9 TAHUN 2018 DI KABUPATEN JENEPONTO	
Lamanya Penelitian : 2022-02-07 s/d 2022-03-07	
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.	
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
15/02/2022 08:52:36	Ditetapkan di Jeneponto Pada Tanggal 15 Februari 2022 KEPALA DINAS,
	 H. MERIYANI, SP. M. SI Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19690202 199803 2 010
	Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Rp. 0 -	
	

Lampiran surat penelitian kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia cq. Direktur Impor.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://law.fakultas.unhas.ac.id>

Nomor : 6977AUN4.5.3/PT.00/2022 Makassar, 12 Agustus 2022

Lampiran : -
Hal : PENELITIAN

Kepada
Yth. : DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
cq. Direktur Impor
di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : DYNO THIODORES
No. Pokok : B021181322
No. HP : 089695150580
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jalan Cendrawasih 04 No. 10
Pembimbing : 1. Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH
2. Ariani Arifn, SH, MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN FUNGSI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGENDALIAN IMPOR PERGARAMAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Dr. Mubandazul, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 198104162002121004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas,
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas.



Generated by law_informatics_system_fh.unhas in 2022-08-12 14:54:46

1 dari 1

12/08/2022 14:49